

Implementation of Integrated Smart System Platform in Improving the Quality of Public Services through Smart Village In Pucangsari Village, Pasuruan Regency

Penerapan Integrated Smart System Platform Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Smart Village Di Desa Pucangsari Kabupaten Pasuruan

Luqman Hakim^{1*}, Muhammad Imron Rosadi², Agus Prianto³

^{1,2,3}Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

¹lukman@yudharta.ac.id, ²Imron.rosadi@yudharta.ac.id, ³agus.prianto@yudharta.ac.id

Received:
13 November 2023

Revised:
20 November 2023

Accepted:
26 November 2023

Abstract

The purpose of this service is to increase the knowledge and skills of the Pucangsari village government in the concept and implementation of a smart village based on an integrated smart system platform through village administration governance, reporting, and utilization of public service applications. The method used in the integrated smart system platform development program in village government services includes three stages; the first stage of preparation by conducting surveys and interviews related to the potential and problems faced by prospective program partners; the second stage of making and developing Integrated smart system Platform Applications; and the third stage of capacity building in the form of workshops, training and socialization. The results of this community service are increased knowledge related to smart villages, the ability to use integrated smart system platform applications and improved public services which include correspondence, billing and payment of land and building taxes, as well as the existence of a community aspiration space as an improvement in the Pucangsari village government performance system.

Keywords: smart village; integrated smart system platform; public services.

Abstrak

Tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan pengetahuan serta skill pemerintah desa Pucangsari dalam konsep dan implementasi smart village berbasis integrated smart system platform melalui tata kelola administrasi desa, pemberitaan, dan pemanfaatan aplikasi pelayanan publik. Metode yang dipakai dalam program pengembangan integrated smart system platform pada pelayanan pemerintah desa meliputi tiga tahapan; tahapan pertama persiapan dengan melakukan survei dan wawancara terkait dengan potensi serta problem yang dihadapi oleh calon mitra program; tahapan kedua pembuatan dan pengembangan Aplikasi Integrated smart system Platform; dan tahapan ketiga capacity building berupa workshop, pelatihan dan sosialisasi. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan terkait smart village, kemampuan penggunaan aplikasi integrated smart system platform dan peningkatan pelayanan publik yang meliputi surat menyurat, penagihan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta adanya ruang aspirasi masyarakat sebagai peningkatan system kinerja pemerintah desa Pucangsari.

Kata Kunci: smart village; Integrated smart system platform; pelayanan publik.

Pendahuluan

Desa Pucangsari merupakan Desa terletak wilayah administrasi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan jumlah penduduk 4,408 dan mayoritas pencaharian pokok masyarakat pada Pertanian, Pengusaha UMKM, Peternakan dan Profesi lainnya, sebagaimana ditampilkan dalam Diagram 1.1 berikut. Sebagaimana data diatas mayoritas pencaharian pokok pada pertanian 73% atau jumlah kepemilikan tanah pertanian 345 keluarga dan pengusaha UMKM dan profesi lainnya dengan jumlah 1.152 Keluarga . Selain itu potensi lain tentang tanah bengkok desa pucangsari dengan 112,06 Ha, Tanah pasar desa 1,60 Ha, ruang publik taman desa 2,00 Ha (Data BPS, 2021).

Pada Tahun 2023 Desa Pucangsari diberikan perhatian khusus dalam pengembangan pelayanan digital oleh Dinas DPMD sebagai bentuk pengembangan pelayanan berbasis pada digitalisasi (Nurkholis et al., 2022) sebagai upaya membangun *smart Village* tujuan untuk kemandirian desa (Saidah et al., 2022) yang menunjang sistem pelayanan kependudukan, PBB dan juga monitoring kondisi sosial pembangunan desa berbasis IT sebab inovasi dalam pelayanan desa hari ini lebih pada integrasi IT dalam pelayanan (Selfia et al., 2022). Berdasarkan keputusan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang 1650 Desa Lokasi Desa Cerdas Fase III Tahun 2023 Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu desa yang terpilih sebagai lokasi desa cerdas yaitu untuk mendorong pembangunan desa yang inovatif dalam memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan teknologi (Stepen, 2005). Selain itu desa Pucangsari sudah mempunyai website desa yang bisa diakses melalui Google WEB pada link, namun masih berupa profil desa. Konsep Smart Village adalah sebuah konsep yang digagas oleh Kementerian Desa.

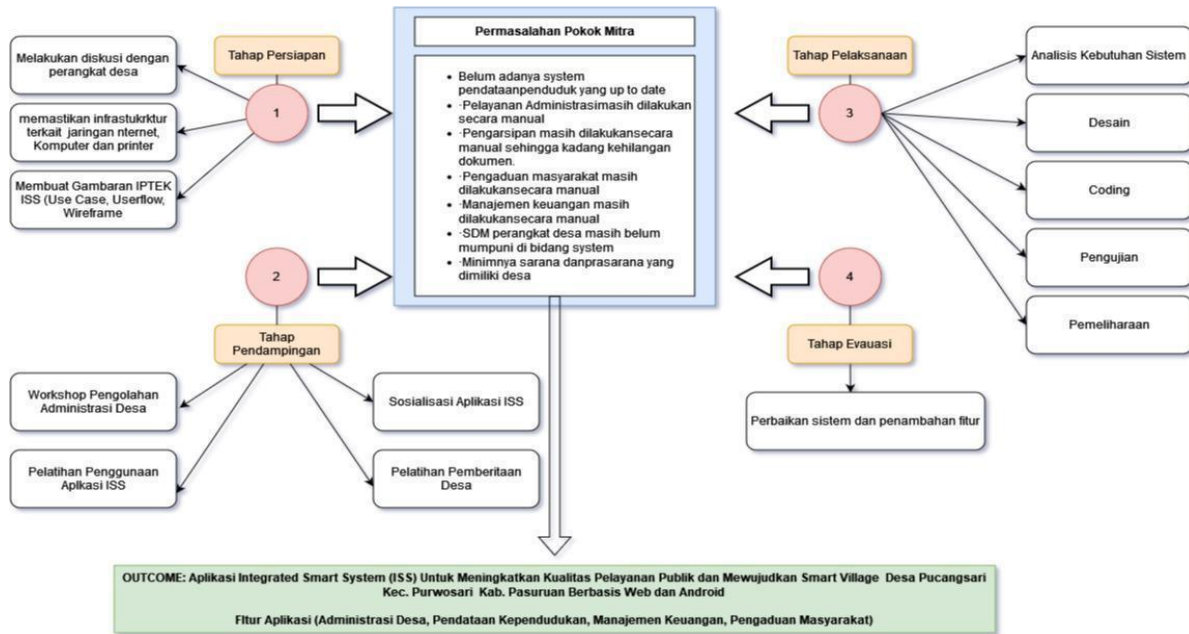
Konsep Smart Village sehingga dalam penerapannya dapat dampak terhadap pelayanan yang maksimal pada system pelayanan desa memberikan dampak positif dan maksimal (Kurniati et al., 2018) dengan inovasi dalam pelayanan berbasis IT akan mampu mengurangi praktek patologi pelayanan public (Husein, 2021) terlebih didesa dengan pasuruan adalah basis desa dan desa memiliki tipologi jarak yang jauh antara pemukiman dengan pusat pelayanan (Putra et al., 2022) sehingga dengan kehadiran IT mampu mendekatkan pelayanan dan menghapus jarak (Ticoalu et al., 2017) . Beberapa komponen menunjang tata kelola Smart City yang diperlukan antara lain smart economy, smart

infrastructure, smart governance, smart environment, smart living, dan smart people menunjukkan perlunya strategi dan taktik kinerja sector public (Hasibuan & Sulaiman, 2019) sebagai dasar ICT (*information Comuncation of Tecnologi*) (Pereira et al., 2018) dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan public yang mampu memberikan kepuasan (Sitanggang et al., 2020), tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus meningkatkan pembangunan (Giuliodori et al., 2023). Konsep smart governance merupakan salah satu komponen penting dalam konsep smart village, namun Implementasi smart governance masih menghadapi berbagai kendala dimasa transisi (Giuliodori et al., 2023) sebagaimana didesa Pucangsari keterbatasan sumber daya manusia dan regulasinya. Smart governance juga dianggap penting untuk pembangunan yang berkelanjutan sebab proses perkembangan IT sebagai monitoring (Sitorus & Tanti, 2023).

Pelayanan publik di Desa pucangsari mempunyai beberapa masalah yaitu; pertama, desa belum siap menjadi pilot project smart village; kedua, kondisi pelayanan publik yang masih manual atau konvensional; dan ketiga, perangkat desa masih belum menyadari terkait pentingnya memanfaatkan teknologi informasi dalam mengolah data informasi kepada masyarakat. Melalui pengabdian ini, fokus program tentang Smart Village yang membangun sebagaimana Integrated Smart System (ISS) yang memiliki novelty (keterbaharuan) Smart governance, yang meliputi; pelayanan publik, tatakelola dan tata pamong pemerintahan desa. Sehingga desa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan desa untuk menuju desa mandiri, maju, sejahtera dan modern sehingga system yang dibangun mampu mewujudkan smart village pada desa Pucangsari.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan selama 8 bulan. Mulai dari bulan April sampai bulan November 2023. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pendampingan.



Gambar 1. Gambaran Umum Tahapan Pelaksanaan Program
 Sumber: Tim PKM (2023)

Tahap Persiapan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan melakukan survey, wawancara pendahuluan terkait dengan potensi serta problem yang dihadapi oleh calon mitra program. Penelitian pendahuluan dalam pengabdian ini telah dilakukan pada bulan April 2023 dengan metode pengumpulan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Sekretaris Desa Pucangsari. Tahapan awal program PKM yaitu tahap persiapan yang didalamnya pengelolaan perizinan PKM, komunikasi dan koordinasi dengan mitra terkait identifikasi masalah serta tujuan, dan juga kesepakatan Kerjasama dalam program PKM.



Gambar 2. FGD Tim Yudharta dengan Mitra Program

Sumber: Tim Yudharta

Tahap Pelaksanaan

Pembuatan dan pengembangan aplikasi *Integrated smart system Platform (ISSP)* sesuai fitur yang telah disepakati dalam identifikasi masalah dan tujuan.

Tahap Pendampingan

Pada tahapan ini dilakukan capacity building berupa workshop, pelatihan dan sosialisasi. Beberapa kegiatan dan pelatihan kepada mitra antara lain:

1. Mengadakan Pelatihan penataan administrasi desa dengan mengubah dari cara konvensional/manual menjadi digital yang bisa diakses melalui jaringan internet dari berbasis web maupun android.
2. Sosialisasi penggunaan *Integrated smart system Platform (ISSP)* agar perangkat desa dan masyarakat dapat mengoperasikan secara online, mandiri, baik dan benar.
3. Mengadakan Pelatihan dan bimtek Pengolahan Aplikasi *Integrated smart system Platform (ISSP)*
4. Mengadakan Pelatihan pelatihan kepada perangkat desa untuk memberikan keterampilan dalam membuat pemberitaan desa, video, foto, pengumuman, dan informasi lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi sudah merubah tatanan social dan culture (Tanera, 2023) bahkan pada system pengelolaan sector public (Parlina et al., 2023) terutama pada layanan didesa sangat dibutuhkan mengingat kabupaten pasuruan memiliki wilayah yang luas dan terdiri 360 desa. Berdasarkan riset peneliti urgensitas penerapan teknologi ICT dalam pelayanan public itu penting hal ini dapat dipahami bahwa Teknologi Informasi (IT) berperan penting dalam pelayanan modern pada era digital. Dengan optimalisasi IT dalam pelayanan didesa pucangsari dapat dilihat akan dampak positifnya meliputi akuntabilitas (Ariandi et al., 2022) kinerja pemerintah desa Pucangsari untuk menyediakan layanan public berbasis WEB dan Andorid sehingga masyarakat dapat terlayani mengingat akan georgrafis pedesaan yang luas serta kondisi akan sosio culture economic masyarakat adalah petani dan pekerja pabrik atau buruh pabrik.

Efisiensi dan penghematan biaya (Ticoalu et al., 2017) dalam penyelenggaraan pelayanan public sebab pengelolaan data dan sumber daya dapat diminimalisir dengan paperless (Subiyantoro, 2020) dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran desa untuk tidak digunakan pada administrasi dan ATK, Sehingga menunjang Pelayanan cepat dan tranparansi terlebih pada pelayanan fiscal desa berbasis system pelayanan surat menyurat terlebih pembayaran PBB (Nova Berliana, 2021). Dengan layanan IT dalam pembayaran PBB dapat mempermudah bagi pelayanan desa sekaligus mempercepat dan mudah layanan masyarakat.

System IT pada pelayanan public memudahkan dalam interaksi pelayanan melibatkan mereka dalam proses penyelenggaraan tatakelola didesa sebagaimana Pelayanan Lebih Cepat: Dengan penggunaan TI, mampu memberikan pelayanan lebih cepat. Sebagaimana layanan dan pengaduan online, pengajuan permohonan secara elektronik dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin atau layanan lainnya. Peningkatan Kualitas Pelayanan berbasis TI dapat membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik. Ini dapat memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan layanan kepada warga.

Kegiatan dan hasil pelaksanaan PkM mengarah pada pembenahan institusi kelembagaan dengan mempelajari SOP pelayanan Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan juga dijelaskan melalui Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan dan Catatan Sipil. Pada pasal 9 *point f* dan *g* menjelaskan atas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan; dan melakukan pengkajian pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Tahapan Pembuatan SOP dan SPM pelayanan publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi mekanisme pada pelayanan (Mukti, 2017) begitu juga pengembangan layanan berbasis IT didesa Pucangsari, SOP ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan informasi public yang dibutuhkan

oleh masyarakat. Dalam penyusunan SOP ini dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan SOP ini sebagai pedoman atau acuan bagi aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan public didalam memaksimalkan pelayanan public sebagai panduan yang mendokumentasikan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh petugas desa melalui FGD pegawai pemerintah desa dan masyarakat sebagai uji public dalam memberikan pelayanan kepada penduduk desa. SOP ini membantu memastikan konsistensi, transparansi, dan efisiensi dalam pelayanan yang diberikan.



Gambar 3. FGD terkait SOP Pelayanan publik berbasis Digital dan Rancangan Aplikasi

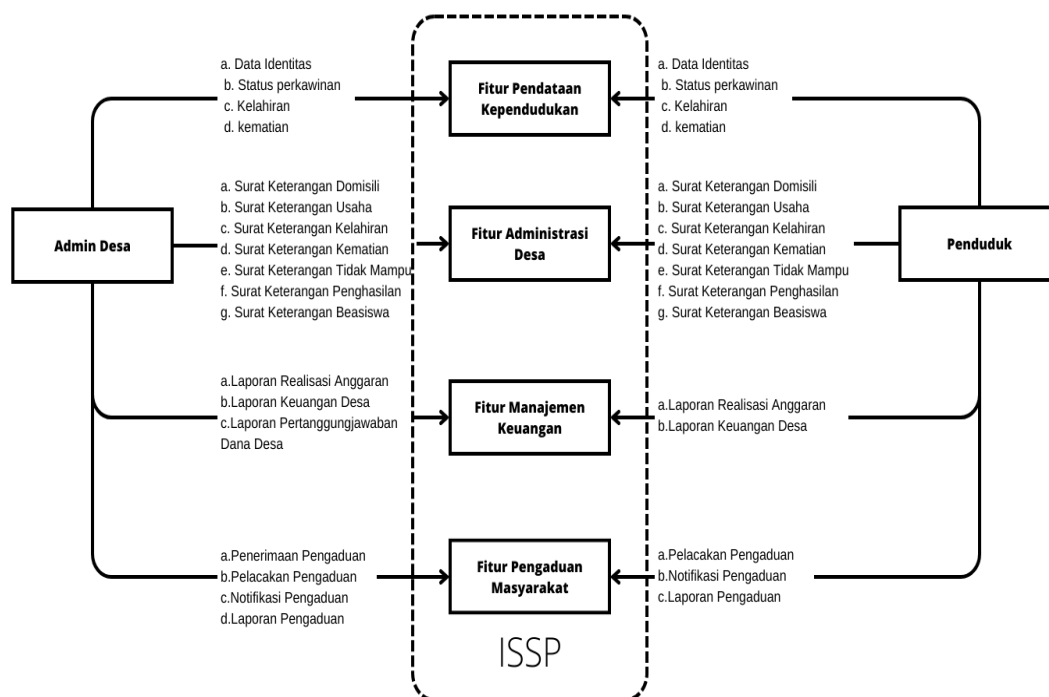
Pada tahapan *legal drafting* ini merupakan luaran sebagai penguatan terhadap institusi pemerintah desa sebagai rujukan atas pemberlakukannya pelayanan desa dan penagihan dan pembayan PBB dengan aplikasi system IT. Peraturan Desa tentang pelayanan publik di desa pucasngsari yang disahkan melalui Perdes Nomor 243/424.316.2.11/2023 merupakan susunan peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengatur penyediaan layanan publik kepada penduduk desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik serta memastikan bahwa pelayanan tersebut berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengembangan Sistem Pelayanan Publik

Setelah SOP dan SPM ditentukan melalui Peraturan kepala desa, dilanjutkan dengan mengaplikasikan kedalam system web sebagai Tujuan dan harapan dari progam pengolahan dan perawatan Website Desa yang di jalankan di Desa Pucangsari, adalah memudahkan staff

dan masyarakat desa dalam pelayanan administrasi surat menyurat kependudukan. (Husein, 2021). Setelah masuk pada fitur tersebut terdapat tampilan terkait pada kebutuhan system program ISSP dengan masyarakat memilih pelayanan apa yang dibutuhkan sebagaimana pelayanan surat menyurat, pembayaran dan tagihan PBB, Informasi Potensi Desa dan hingga pada etnografi desa. Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi pengolahan dan perawatan website desa, anggota staff atau aparatur desa telah mampu mengolah website desa seperti menginput data kependudukan di website desa, membuat layanan administrasi surat kependudukan beserta cara mencetak surat melalui website desa dan mengupload berita kegiatan desa pada website serta mengenai perawatan website desa sendiri.

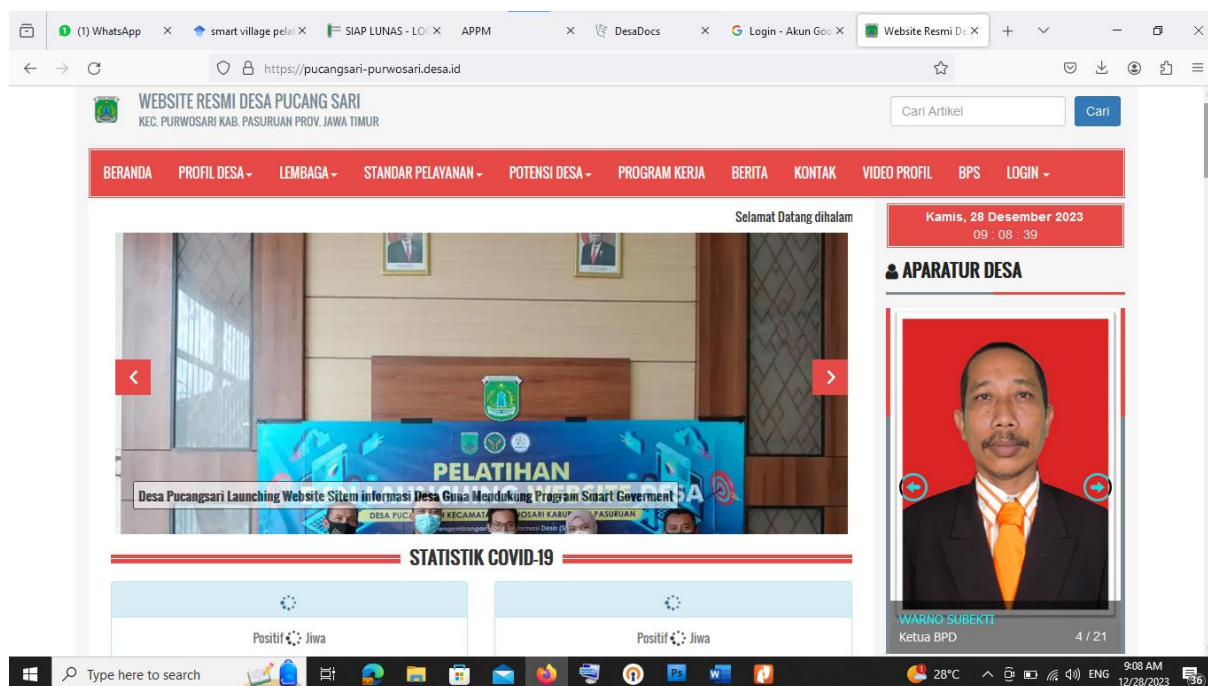
Berikut adalah website desa yang telah di rancang dan di buat oleh tim PkM Universitas Yudharta Pasuruan:



Gambar 4. Gambaran *Integrated Smart System Platform* Desa Pucangsari

Sumber: pengolahan Tim PKM Yudharta

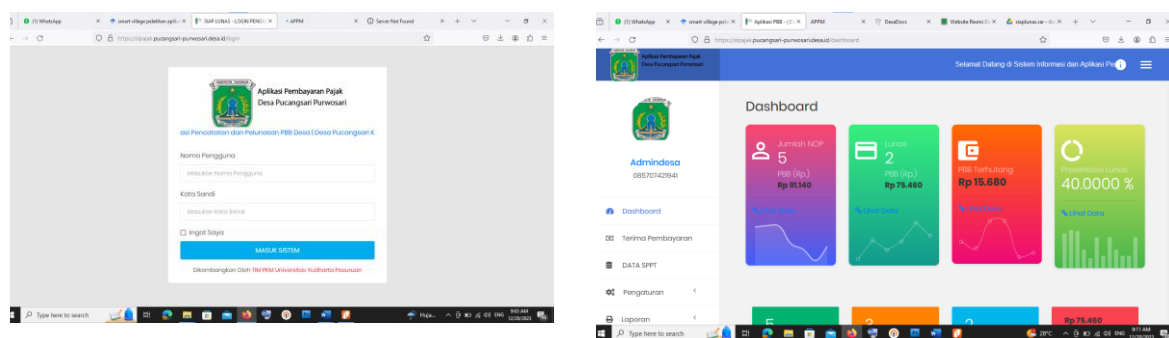
Pada aplikasi website desa menampilkan beberapa informasi terkait profil desa, kegiatan desa, dan pemberitaan desa. Pada website desa ini juga menampilkan etnografi desa, potensi desa pucangsari.



Gambar 5. Tampilan Website Desa Pucangsari

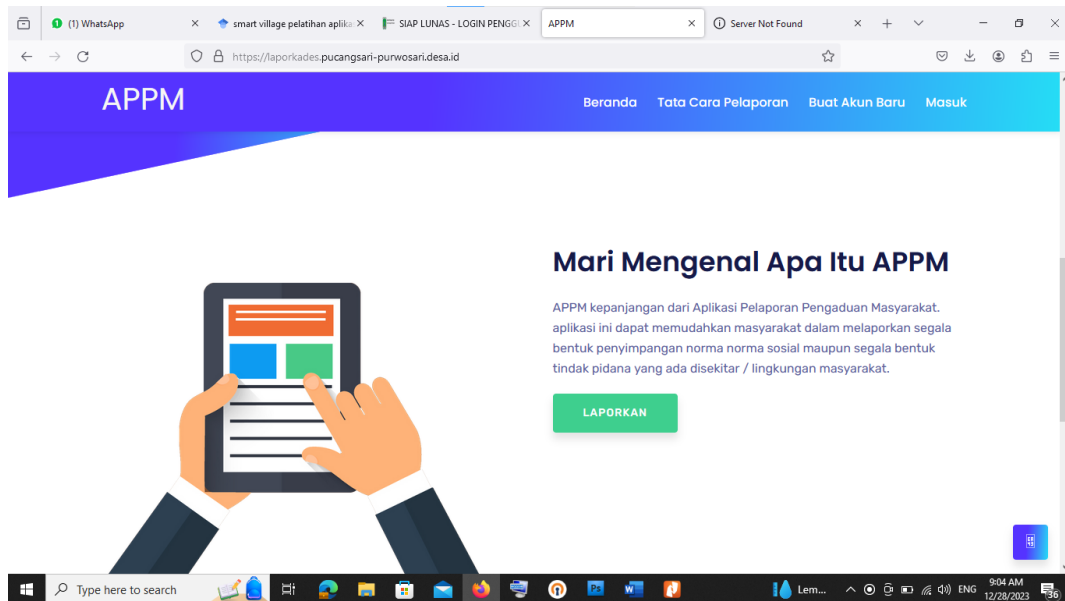
Pada aplikasi pajak ini pemerintah desa bisa melakukan monitoring terkait progress pembayaran pajak oleh masyarakat. Warga juga bisa melakukan pembayaran secara online terkait pajaknya dan juga bisa memantau terkait pelunasan dan penunggakan terkait pajak.

D



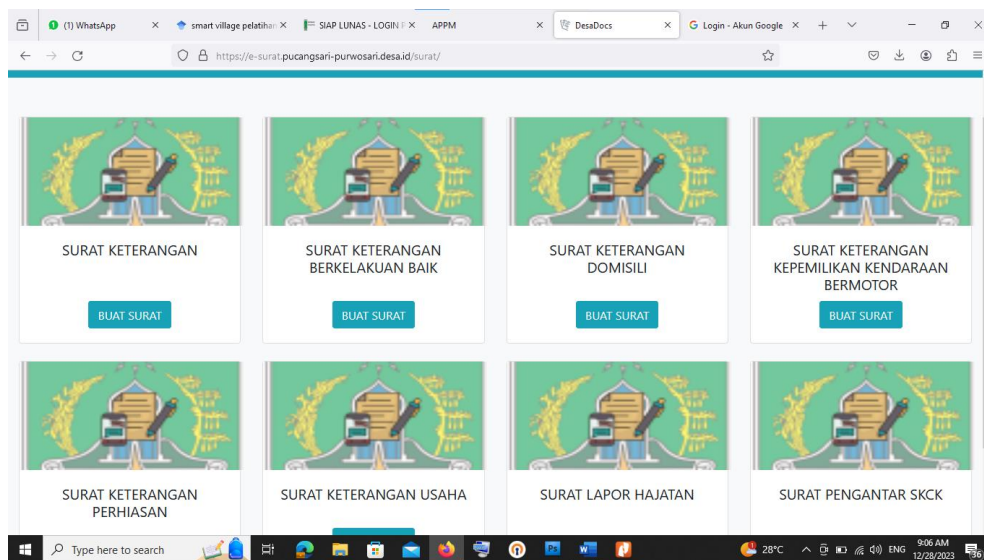
Gambar 6. Tampilan aplikasi Pembayaran Pajak Bumi bangunan (PBB)

Pada aplikasi pengaduan masyarakat ini warga desa Pucangsari bisa melakukan dan mengajukan aspirasi atau keluhan warga terkait pelayanan, sarana prasarana desa, serta jika ada bencana alam atau warga yang sakit yang membutuhkan bantuan dari desa.



Gambar 7. Tampilan aplikasi pengaduan masyarakat

Pada aplikasi surat menyurat ini warga bisa mengajukan surat secara mandiri kemudian mengambil surat secara cetak ke kantor desa. Adanya aplikasi surat ini pelayanan desa lebih cepat dan efisien.



Gambar 8. Tampilan aplikasi surat menyurat desa

Sosialisasi dan Pelatihan

Pada tahapan ini dilakukan capacity building berupa pendampingan workshop, pelatihan, sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan di balai desa pucangsari pada tanggal 25

November 2023. Pada kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 30 orang yang terdiri dari pemerintah desa pucangsari, organisasi masyarakat, serta perwakilan dari masyarakat.

Pada kegiatan ini dibuka oleh sambutan kepala desa pucangsari yaitu bapak Suprpto, pemaparan materi oleh Tim PKM Universitas Yudharta Pasuruan, sesi tanya jawab dan pelatihan penggunaan aplikasi.



Gambar 9. Sosialisasi dan pelatihan Aplikasi oleh Tim PKM.

Pada sambutan kepala desa, kepala desa menuturkan bahwa adanya aplikasi ini sangat membantu dalam peningkatan layanan desa karena pada sekarang ini era memasuki era digitalisasi. Secara tidak langsung peningkatan SDM pemerintah desa harus juga ditingkatkan. Setelah itu penyampaian materi oleh Tim PKM Universitas Yudharta Pasuruan, pada sesi ini Tim menjelaskan terkait materi smart village, pengembangan desa pucangsari menuju smart village serta manfaat adanya smart village. Selain itu juga tim PkM

memberikan pelatihan terkait penggunaan aplikasi kepada petugas pelayanan desa dan juga memberikan edukasi dan pelatihan kepada warga untuk melakukan pengajuan surat menyurat secara mandiri, pembayaran pajak dan aspirasi warga melalui aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Tim PKM Universitas Yudharta Pasuruan.

Secara jelas, tampilan hasil bangunan system melalui ISSP meliputi Profile Desa, Informasi data etnografi desa, Profile dan Informasi kegiatan Desa serta fitur evaluasi hasil pelayanan pemerintah desa. Pelayanan berbasis IT sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak akses pelayanan kependudukan dan penduduk yakni surat menyurat. Selama 2 bulan tim melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan berbasis IT melalui google form, maka terdapat antisipasi masyarakat atas pelayanan tersebut. Hal ini dibuktikan melalui respon atas pelayanan tersebut yang cukup baik. Keunggulan IT dalam pelayanan public dipucangsari mampu mengurangi ketidak tertiban setoran petugas pemungut pajak PBB dan pembayaran penanggung pajak, perihal tertib akan pembayaran pajak berbasis IT dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah desa (Prianto, 2008).

Selain ini akan maksimal jika terdapat dukungan dari pihak pemerintah desa dan masyarakat sebab keberadaan pelayanan berbasis ISSP akan mampu berjalan ketika system dijalankan perangkat desa dan masyarakat. Kedepan optimalisasi dalam pelaksanaan dalam pengembangan system ISSP mampu mendekatkan pelayanan public desa pucangsari sebagai pelayanan desa yang prima. Sebab mengingat era digitalisasi semua serba cepat (*disruption era*) maka diperlukan pemerintah desa untuk bisa berbenah diri untuk responsifitas dalam pelayanan public melalui pelaksanaan perubahan pelayanan desa pucangsari berbasis digital atau digitalisasi pelayanan public, hal ini sangat erat dengan penyediaan pelayanan prima.

Berharap kedepan dengan pelayanan IT tersebut bisa berkembang sebagai penguatan Pemerintah Desa sebagai sector public yang responsive, inovatif dan kompetitif ditengah globalisasi dan era digitalisasi (Hermawanto & Anggrani, 2020) terutama menghadapi kondisi alam yang *unpredictable* seperti halnya Wabah Pandemi (Tasyah et al., 2021). Hal ini menandakan bahwa desa pucangsari sudah mampu beradaptasi terhadap kemajuan zaman dan perkembangan teknologi baik ditingkat perangkat desa dan masyarakat.

Evaluasi Kegiatan

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan PkM ini maka dilakukan evaluasi sebelum dan setelah pelaksanaan PkM. Tabel 1 adalah perbandingan kegiatan sebelum dan sesudah adanya kegiatan ini.

Tabel 1. Perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian

Sebelum Program	Setelah Program
Pihak mitra belum memahami smart village	Setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan di desa telah memahami smart village
Pihak mitra belum memiliki SOP pelayanan publik digital	Setelah kegiatan pihak mitra memiliki SOP Pelayanan publik digital
Pihak mitra belum memahami penggunaan aplikasi pelayanan desa	Setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan di desa telah memahami penggunaan aplikasi pelayanan desa
Proses pengajuan surat menyurat masih secara manual dan harus kedesa, penagihan secara manual, dan belum adanya aplikasi aspirasi masyarakat	Setelah kegiatan dapat langsung mengajukan surat permohonan melalui aplikasi, setelah mengisi aplikasi membawa bukti tiket untuk pengambilan surat, penagihan pajak secara digital, serta pengaduan masyarakat secara digital

Sumber: Hasil pelaksanaan Tim PkM (2023)

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kondisi pemerintah desa pucangsari maka diperlukan inovasi desa pada pelayanan public sebab kebutuhan pelayanan oleh masyarakat sering kali terhambat adanya profesi dan aktifitas warga, sehingga sering kali masyarakat kurang bisa terlayani secara maksimal. Oleh sebab itu kegiatan PkM pada pengembangan pelayanan public desa Pucangsari berbasis ISSP sangat diperlukan, terlebih pada pembayaran PBB yang sering kali terdapat complain masyarakat atas mekanisme pembayaran dan juga bukti telah terbayar atau pembayaran yang double. Pengembangan sistem pelayanan berbasis ISSP pada pelayanan desa pucangsari sudah pada tahapan penguatan institusi pemerintah desa melalui penyusunan dan pembahasan SOP pelayanan masyarakat dan juga SPM desa serta sudah menyusun regulasi desa melalui Perdes sebagai dasar akan pemberlakuan pelayanan berbasis IT. Pada tahapan luaran kegiatan ini sudah pada publikasi media massa, SOP pelayanan public, SPM pelayanan public. Untuk keberlanjutan system layanan didesa pucangsari berbasis IT maka perlu adanya pengoptimalisasian system IT pada pelayanan

public diperlukan komitmen pada setiap pelaksana perangkat dan pengguna layanan public, dan memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan di perusahaan demi mencapai kepuasan pelanggan. Serta Pengembangan kerjasama dalam pada system PBB dengan Bank untuk mendaat VA, dan sharing data system ISSP desa pucangsari dengan data Kepndudukan pad Dispenduk Capil.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih atas terselenggaranya Program Pengabdian Kepada Masyarakat dari Hibah Kemenristek DIKTI Tahun 2023 serta kepada pemerintah desa Pucangsari beserta masyarakat yang memberikan waktu, sarana dan prasarana selama pelaksanaan kegiatan. Dan terima kasih kepala LPPM Univeristas Yudharta Pasuruan atas pendampingan selama kegiatan berjalan, dan enumerator dari mahasiswa Program studi Teknik Informasika dan Administrasi Publik Univeristas Yudharta Pasuruan.

Daftar Referensi

- Ariandi, Y., Adianto, A., & As'ari, H. (2022). Tranparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal ...*, 4, 2103–2108.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/5711/4208>
- Giuliodori, A., Berrone, P., & Ricart, J. E. (2023). Where smart meets sustainability: The role of Smart Governance in achieving the Sustainable Development Goals in cities. *BRQ Business Research Quarterly*, 26(1), 27–44.
<https://doi.org/10.1177/23409444221091281>
- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). Smart Cit, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127–135.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097>
- Hermawanto, A., & Anggrani, M. (2020). Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas : Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World. In *LPPM UPN VY Press*.
- Husein, M. (2021). Budaya Dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan. *Aceh Anthropological Journal*, 5(2), 187. <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.5624>
- Kurniati, R., Jaroji, & Agustiawan. (2018). Sistem layanan mandiri kantor desa . *Jurnal Inovtek Polbeng -Seri Informatika*, 3(1), 16–23.
- Mukti, T. C. (2017). Pengaruh Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen. *Edisi Januari*, 2(1), 14–26.
- Nova Berliana, 2021 : 41). (2021). Landasan Teori ادیدج. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 17–39.
- Nurkholis, A., Budiman, A., Pasha, D., Ahdan, S., & Andika, R. (2022). *DIGITALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT PADA DESA*. 3(1), 21–28.
- Parlina, R., Wijatmoko, S., & Syafutra, R. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Sektor Publik Menuju Birokrasi Modern. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 489–498.
- Pereira, G. V., Parycek, P., Falco, E., Kleinhans, R., Chun, S. A., Adam, N. R., & Noveck, B. (2018). Smart Governance in the Context of Smart Cities: A Literature Review. *Info. Pol.*, 23(2), 143–162. <https://doi.org/10.3233/IP-170067>
- Prianto, A. (2008). No TitleМаркетинг по Котлеру. *Publishia Unmer*, 3, 282.
- Putra, J. A., Prasetyo, B., & Ariefianto, L. (2022). E-SuKet: Peningkatan Kualitas Layanan Desa Tenggarang Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso melalui Implementasi Layanan Surat Keterangan Berbasis Elektronik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 283–290. <https://doi.org/10.32815/jpm.v3i2.1100>
- Saidah, N., Khasanah, L., & Ridloah, S. (2022). *Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart Village* (Vol. 6, Issue 2).
- Sellfia, N. R., Dayat, U., & Aryani, L. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta. *Kinerja*, 18(4), 590–598. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10363>
- Sitanggang, R., Raka, A. A. G., & Mardika, I. made. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Pemecutan Kelod Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 72–82. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1947>
- Sitorus, P. P. W., & Tanti, L. (2023). Rancang Bangun Aplikasi Kepuasan Konsumen Dengan Metode Importance Performance Analysis Berbasis Web. *Information Technology and Cyber Crime ...*, 1(1), 41–52. <https://ejournal.cip.or.id/index.php/ITCC/article/view/129>
- Stepen, C. J. (2005). *No Title* (P. E. R. Vázquez (ed.); Quinta edi). The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Subiyantoro, L. J. (2020). ... E-Service Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *Journal of Politic and Government Studies*, 14010113140103. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/27271/23839>
- Tanera, L. (2023). Tantangan Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Dan Trasformasi Digital Dalam Bisnis Waralaba. *Jurnal Multilingual*, 3(3), 1412–4823.
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212–224. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>
- Ticoalu, D. I., Kaawoan, J. E., & Lopian, M. T. (2017). Efektivitas Pemekaran Desa dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–13.